

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abhan, dkk, 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Jakarta:

Perihal Para Penyelenggara Pemilu, Bawaslu.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta :

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2006, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga

Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam

Pengujian Undang-Undang, Jakarta : RadjaGrafindo.

Gaffar, Janedjri M, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat

Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta :

Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 1,

Jakarta : Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet,1, Konstitusi

Press, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo.

Siahaan, Maruarar, 2015, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Sri, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 14, Jakarta : Rajawali Press

Teguh Prasetyo, 2018, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat,Depok : Rajawali Pers.

-----, 2018, Filsafat Pemilu, Bandung : Nusamedia.

-----, 2018, Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, Raja Grafindo Persada: Depok .

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta : Kencana.

2. Jurnal

Ditasman, “Peran DKPP RI Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 2 Agustus 2021.

Jihan Anjanía Aldi, dkk, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia”, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 5 No. 2, September 2019.

M. LutfiChakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik

Pelanggaran Pemilihan Umum”, Jurnal USM Law Review Vol 1
No 2 Tahun 2018.

Sriwaty Sakkirang, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah
Konstitusi”, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode etik dan pedoman
perilaku penyelenggara pemilihan umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XIX/2021.